

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama dalam mengukur kinerja ekonomi suatu daerah karena mencerminkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Namun, PDRB juga memiliki keterbatasan dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang menikmati output tersebut. Suatu daerah dengan nilai PDRB yang tinggi belum tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang baik apabila jumlah penduduknya besar, sehingga pendapatan yang diterima per individu relatif rendah. Oleh karena itu, PDRB per kapita digunakan sebagai indikator yang lebih representatif karena mampu menunjukkan rata-rata output atau pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, PDRB per kapita dinilai lebih akurat dalam mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta memungkinkan perbandingan antarwilayah secara lebih objektif (BPS, 2023). Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, penggunaan PDRB per kapita menjadi penting untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata.

Pembangunan ekonomi modern tidak hanya menekankan pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan pemerataan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Salah satu isu yang menjadi perhatian global maupun nasional adalah isu kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi. Keikutsertaan perempuan sebagai bagian dari sumber daya manusia menyimpan potensi yang signifikan dalam mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, khususnya apabila mereka memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, optimalisasi peran perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam hal tersebut, salah satu indikator yang mencerminkan peran perempuan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam pembangunan manusia. Ketimpangan gender dapat menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia, karena sebagian potensi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat menurunkan efisiensi dan produktivitas ekonomi secara agregat (UNDP, 2020).

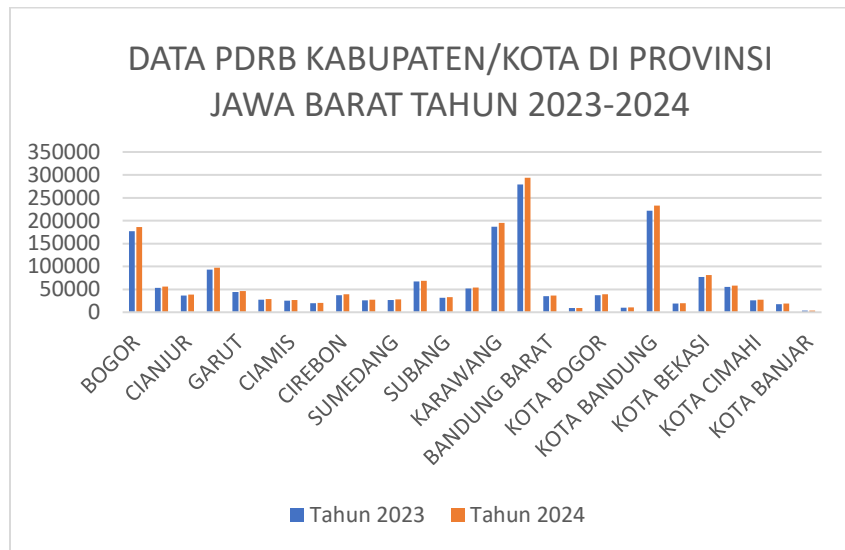
Menurut World Bank (2018), perekonomian global diperkirakan mengalami kerugian hingga 160 triliun dolar akibat ketimpangan gender dalam partisipasi ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa, ketidaksetaraan gender tidak semata-mata merupakan isu sosial, melainkan juga membawa dampak yang

signifikan terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan (Fauziyah & Juliprijanto, 2022). Meskipun Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia, dan menunjukkan peningkatan PDRB per kapita dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan antarwilayah. Selain itu, masih terdapat ketimpangan gender dalam berbagai aspek pembangunan, seperti pendidikan perempuan yang belum merata, serta partisipasi perempuan di pasar kerja yang masih berfluktuasi di beberapa daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi perempuan sebagai sumber daya manusia produktif belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah.

Selain itu, rata-rata lama sekolah perempuan dipilih sebagai indikator yang merepresentasikan kualitas modal manusia perempuan. Pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sehingga mampu mendorong peningkatan output dan pendapatan per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan perempuan merupakan salah satu bentuk peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi. Di sisi lain, jumlah penduduk bekerja perempuan mencerminkan tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Dimana, semakin banyak perempuan yang bekerja, maka semakin besar kontribusi perempuan dalam proses produksi dan peningkatan output ekonomi daerah. Partisipasi kerja perempuan menunjukkan bahwa, potensi sumber daya manusia perempuan dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya jumlah perempuan yang bekerja

dapat menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja perempuan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Teori Human Capital Becker (1964), menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, keterampilan, dan partisipasi kerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan output ekonomi. Oleh karena itu, ketiga variabel tersebut digunakan untuk menjelaskan peran penduduk perempuan secara komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang tercermin pada PDRB per kapita, yang mencakup aspek kesetaraan pembangunan manusia (IPG), kualitas pendidikan (RLS Perempuan), dan partisipasi kerja perempuan (Jumlah Penduduk Bekerja Perempuan).

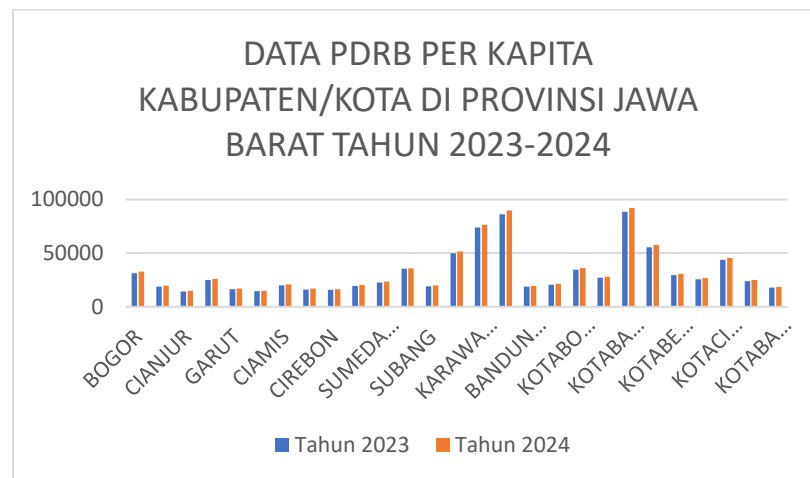
Untuk memperkuat analisis tersebut, perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat melalui perbandingan antara PDRB dan PDRB per kapita. PDRB mencerminkan besarnya output ekonomi daerah, sedangkan PDRB per kapita menunjukkan sejauh mana output tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Untuk memperkuat penjelasan tersebut, berikut disajikan perkembangan PDRB dan PDRB per kapita di Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2023-2024 :



Gambar 1. 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (2023-2024) Dalam Satuan Juta Rupiah

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023-2024, seluruh wilayah menunjukkan tren peningkatan nilai PDRB yang mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi secara umum. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antarwilayah, di mana daerah dengan basis industri seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Karawang memiliki nilai PDRB yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Di sisi lain, wilayah dengan skala ekonomi kecil seperti Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran, menunjukkan nilai PDRB yang relatif rendah. Dengan adanya perbedaan tersebut mencerminkan bahwa terdapat ketimpangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, analisis juga dilengkapi dengan penggunaan PDRB per kapita yang disajikan dalam satuan ribu rupiah. Berikut dapat dilihat melalui data PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023-2024.



Gambar 1. 2 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (2023-2024) Dalam Satuan Ribu Rupiah

Sumber : Open data jabar

Berdasarkan data PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023-2024, seluruh wilayah menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak terjadi secara merata antarwilayah. Daerah dengan PDRB per kapita tertinggi pada tahun 2024 antara lain yaitu Kota Bandung sebesar 92,183 ribu rupiah, Kabupaten Bekasi sebesar 89,700 ribu rupiah, dan Kabupaten Karawang sebesar 76,301 ribu rupiah. Tingginya nilai tersebut menunjukkan bahwa, wilayah-wilayah tersebut memiliki tingkat produktivitas ekonomi dan rata-rata pendapatan masyarakat yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini didukung oleh berkembangnya aktivitas sektor industri, perdagangan, dan jasa yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang besar.

Sebaliknya, beberapa daerah masih memiliki PDRB per kapita yang relatif rendah, seperti Kabupaten Cianjur dengan PDRB per kapita sebesar 14,781 ribu

rupiah, Kabupaten Tasikmalaya sebesar 15,034 ribu rupiah, dan Kabupaten Cirebon sebesar 16,507 ribu rupiah pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut masih lebih rendah dibandingkan daerah dengan tingkat ekonomi yang lebih maju. Perbedaan nilai PDRB per kapita antarwilayah tersebut, mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jika dibandingkan dengan grafik PDRB, terlihat daerah dengan nilai PDRB yang tinggi tidak selalu memiliki PDRB per kapita yang paling tinggi, karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

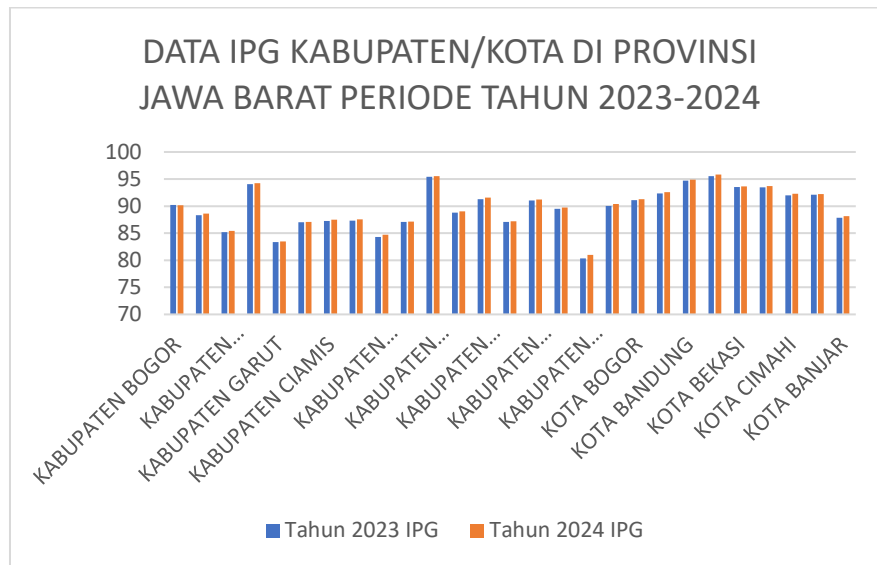
Dengan demikian, peningkatan output ekonomi belum tentu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Maka dari itu, penggunaan PDRB per kapita sebagai indikator pelengkap menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah. Perbedaan antara PDRB dan PDRB per kapita menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ekonomi suatu daerah belum tentu mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Suatu kabupaten/kota dapat memiliki nilai PDRB yang besar, namun PDRB per kapitanya relatif rendah apabila jumlah penduduknya juga besar. Sebaliknya, daerah dengan nilai PDRB yang lebih kecil dapat memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi apabila output ekonomi yang dihasilkan dinikmati oleh jumlah penduduk yang lebih sedikit. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan PDRB per kapita sebagai variabel dependen karena dinilai lebih mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dan

memungkinkan perbandingan kondisi ekonomi antarwilayah secara lebih objektif dibandingkan penggunaan PDRB semata.

Variasi PDRB per kapita antarwilayah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya output ekonomi, tetapi juga oleh kualitas dan pemanfaatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada akumulasi modal fisik, tetapi juga pada kemampuan suatu wilayah dalam memanfaatkan potensi sumber daya manusia secara optimal, termasuk penduduk perempuan. Hal ini sekaligus memperkuat urgensi penelitian dalam mengkaji peran penduduk perempuan khususnya melalui aspek pendidikan, dan partisipasi kerja dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang tercermin dalam PDRB per kapita. Dengan demikian diperlukan analisis empiris lebih mendalam mengenai bagaimana peran perempuan melalui aspek kesetaraan gender, pendidikan, dan partisipasi kerja dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB per kapita di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat peran perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) yakni indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG dihitung sebagai rasio antara indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nilai IPG berkisar antara 0 hingga 100, dimana nilai yang semakin mendekati 100 menunjukkan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Sebaliknya, nilai IPG yang rendah menunjukkan masih adanya

ketimpangan gender dalam pencapaian pembangunan manusia. IPG tidak hanya mencerminkan kesetaraan gender, tetapi juga kualitas sumber daya manusia secara agregat. Semakin setara akses laki-laki dan perempuan terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan ekonomi, maka semakin optimal pula pemanfaatan potensi tenaga kerja dalam mendorong aktivitas ekonomi. Sebaliknya, ketimpangan gender dapat menyebabkan sebagian potensi tenaga kerja, khususnya perempuan tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan efisiensi ekonomi (Klasen & Lamanna, 2009).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa keterbatasan akses pendidikan dan pasar kerja dapat menghambat kontribusi mereka dalam kegiatan ekonomi, sehingga berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Putri Atinna & Juliannisa, 2024). Dalam hal ini, peningkatan IPG mencerminkan semakin besarnya peran perempuan dalam pembangunan, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam beberapa literatur juga disebutkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara PDRB per kapita dan IPG, di mana peningkatan pendapatan daerah dapat mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia, termasuk kesetaraan gender. Namun, dalam penelitian ini, fokus utama yaitu bagaimana peningkatan kesetaraan gender yang tercermin dalam IPG berperan pada peningkatan PDRB per kapita.



Gambar 1. 3 Nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2024 (Indeks)

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

Berdasarkan Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2024. Secara umum seluruh wilayah menunjukkan nilai IPG yang relatif tinggi, yaitu berada pada kisaran di atas 80. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di sebagian besar wilayah sudah relatif kecil, dan hampir seluruh daerah mencatat peningkatan nilai IPG pada tahun 2024, meskipun peningkatan tersebut cenderung tidak terlalu besar. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan secara bertahap dalam aspek kesetaraan gender, khususnya dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Jika dilihat secara detail, daerah dengan nilai IPG tertinggi pada tahun 2024 antara lain Kota Cirebon sebesar 95,83, Kabupaten Sumedang sebesar 95,55, dan Kota Bandung sebesar 94,87. Tingginya nilai IPG di wilayah tersebut menunjukkan

bahwa, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan relatif kecil, sehingga perempuan memiliki akses yang lebih setara dalam berbagai aspek pembangunan. Kondisi ini mencerminkan potensi peran perempuan yang lebih optimal dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah. Sebaliknya, beberapa daerah masih memiliki nilai IPG yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya, seperti Kabupaten Bandung Barat sebesar 81,02, Kabupaten Garut sebesar 83,50, dan Kabupaten Cirebon sebesar 84,74 pada tahun 2024. Walaupun masih berada dalam kategori cukup baik, nilai tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan gender yang perlu diperhatikan, terutama dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi bagi perempuan.

Perbedaan nilai IPG antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender di Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya merata. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa, ketimpangan gender dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga berdampak pada produktivitas dan kinerja ekonomi daerah. Dalam konteks ini, daerah dengan nilai IPG yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih besar dalam memanfaatkan potensi tenaga kerja perempuan secara optimal. Jika dikaitkan dengan PDRB per kapita, terlihat bahwa beberapa daerah dengan nilai IPG tinggi juga memiliki tingkat PDRB per kapita yang relatif tinggi, seperti Kota Bandung dan Kabupaten Bekasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan gender yang lebih baik dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Namun demikian, hubungan tersebut tidak selalu bersifat langsung, karena terdapat faktor lain seperti struktur ekonomi dan jumlah penduduk yang

turut mempengaruhi PDRB per kapita.

Dengan demikian, peningkatan IPG dapat mencerminkan semakin besarnya peran perempuan dalam pembangunan daerah, yang pada akhirnya berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, IPG menjadi salah satu indikator penting dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peran penduduk perempuan berkontribusi terhadap PDRB per kapita di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Meskipun, Indeks Pembangunan Gender (IPG) mampu menggambarkan tingkat kesetaraan gender secara umum, indikator tersebut masih bersifat agregat sehingga diperlukan indikator yang lebih spesifik untuk menjelaskan kualitas sumber daya manusia perempuan, salah satunya melalui rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan yang merupakan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk perempuan. Pendidikan menjadi penting karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang individu tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih produktif dan memiliki pendapatan lebih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas individu, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi secara agregat.

Berdasarkan kondisi tersebut, perkembangan rata-rata lama sekolah perempuan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat disajikan dalam bentuk grafik guna menunjukkan tren serta perbedaan antarwilayah. Dengan demikian, RLS perempuan menjadi indikator penting dalam menjelaskan peran perempuan dalam

mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi yang tercermin dalam PDRB per kapita.



Gambar 1. 4 Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2024 (Tahun)

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

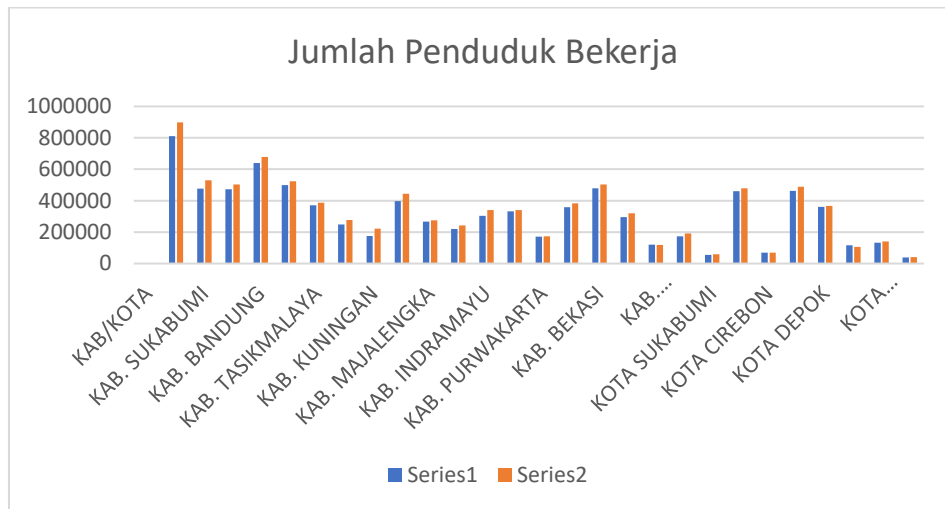
Berdasarkan data rata-rata lama sekolah perempuan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023-2024, secara umum seluruh wilayah menunjukkan tren peningkatan, meskipun dengan kenaikan relatif kecil. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam akses dan partisipasi pendidikan perempuan di berbagai daerah. Namun demikian, masih terdapat perbedaan yang cukup jelas antarwilayah. Daerah dengan perkotaan cenderung memiliki RLS Perempuan yang lebih tinggi, seperti Kota Bekasi (11,79 tahun), Kota Depok (11,29 tahun), dan Kota Bandung (10,78 tahun) pada tahun 2024. Sementara itu beberapa wilayah kabupaten masih memiliki RLS Perempuan yang relatif rendah, seperti Kabupaten Indramayu (6,38 tahun), Kabupaten Cianjur (6,93 tahun), dan Kabupaten Sukabumi

(7,09 tahun). Perbedaan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan perempuan di Jawa Barat belum merata antarwilayah.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa peningkatan pendidikan perempuan, yang terjadi belum sepenuhnya diiringi oleh pemerataan kualitas sumber daya manusia, sehingga kesenjangan yang ada masih berpotensi membatasi peran perempuan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam sektor formal dan pekerjaan yang lebih produktif.

Oleh karena itu, variasi rata-rata lama sekolah perempuan antarwilayah menjadi faktor penting dalam menjelaskan perbedaan tingkat PDRB per kapita. Selain aspek pendidikan, peran perempuan dalam perekonomian juga dapat dilihat melalui partisipasi dalam pasar kerja.

Jumlah penduduk bekerja perempuan menunjukkan banyaknya perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan pasar kerja. Tingginya jumlah perempuan yang bekerja menunjukkan bahwa perempuan memiliki partisipasi yang lebih besar dalam aktivitas produktif sehingga, dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan output ekonomi daerah. Dalam perspektif teori ketenagakerjaan dan human capital, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Ngepah et al., 2021). Untuk melihat perkembangan partisipasi kerja perempuan, disajikan data jumlah penduduk bekerja perempuan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :



Gambar 1. 5 Jumlah Penduduk Bekerja Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2024 (Jiwa)

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

Berdasarkan data BPS, Jumlah Penduduk Bekerja Perempuan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023-2024, secara umum sebagian besar wilayah menunjukkan peningkatan jumlah perempuan yang bekerja. Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk bekerja perempuan tertinggi, yaitu meningkat dari 810.253 jiwa pada tahun 2023 menjadi 897.701 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan juga terjadi di beberapa wilayah lain seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut. Namun, beberapa daerah mengalami penurunan jumlah penduduk bekerja perempuan, seperti Kota Cimahi yang menurun dari 115.910 jiwa menjadi 105.362 jiwa dan Kota Cirebon dari 69.358 jiwa menjadi 68.518 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi kerja perempuan antarwilayah di Provinsi Jawa Barat masih bervariasi. Perbedaan jumlah penduduk bekerja perempuan antarwilayah menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja perempuan dalam kegiatan ekonomi belum merata di

setiap daerah. Sebenarnya, perempuan yang bekerja merupakan bagian dari tenaga kerja produktif yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan output ekonomi dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, rendah atau tidak meratanya jumlah penduduk bekerja perempuan dapat berdampak pada belum optimalnya kontribusi perempuan terhadap peningkatan PDRB per kapita di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pemilihan variabel jumlah penduduk bekerja perempuan dalam penelitian ini, yaitu untuk melihat sejauh mana partisipasi kerja perempuan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah. Berdasarkan berbagai indikator tersebut, dapat dilihat bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami perkembangan ekonomi yang berbeda-beda, dimana tercermin dari variasi PDRB per kapita antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya aktivitas ekonomi, tetapi juga dilihat dari sejauh mana perempuan memperoleh kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui sejauh mana peran perempuan, dan jumlah penduduk bekerja perempuan berkontribusi terhadap variasi PDRB per kapita di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan PDRB per kapita dari tahun ke tahun. Namun, masih terdapat perbedaan tingkat IPG, rata-rata lama sekolah perempuan, dan jumlah penduduk bekerja perempuan antar kabupaten/kota yang cukup besar. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah belum merata sehingga berpotensi memengaruhi perbedaan tingkat PDRB per kapita antarwilayah. Penelitian mengenai gender dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan sebelumnya, namun masih menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian penelitian menemukan bahwa kesetaraan gender dan pendidikan memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda tergantung pada karakteristik wilayah dan indikator yang digunakan. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan lingkup nasional atau antarprovinsi, sementara penelitian pada tingkat kabupaten/kota khususnya di Provinsi Jawa Barat masih relatif terbatas.

Penelitian sebelumnya juga umumnya menggunakan satu indikator gender tertentu, sehingga belum menggambarkan peran perempuan secara lebih komprehensif. Meskipun hasil penelitian tersebut masih menunjukkan inkonsistensi, karena terdapat penelitian lain yang menemukan pengaruh yang tidak signifikan atau berbeda tergantung pada karakteristik wilayah yang diteliti. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat nasional maupun antarprovinsi, sedangkan penelitian pada tingkat kabupaten/kota, khususnya di Provinsi Jawa Barat, yang masih relatif terbatas. Pada penelitian sebelumnya, umumnya hanya menggunakan satu indikator tertentu untuk menggambarkan peran perempuan, sehingga belum mampu menjelaskan kontribusi perempuan secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menggabungkan indikator kesetaraan

gender, pendidikan perempuan, dan partisipasi kerja perempuan dalam satu model analisis pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian menjadi penting karena perempuan merupakan bagian yang besar dari sumber daya manusia produktif yang dimiliki daerah. Peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan pembangunan, serta partisipasi kerja perempuan berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara peran perempuan dan PDRB per kapita diperlukan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesetaraan gender, khususnya di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Maka, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Indeks Pembangunan Gender (IPG), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, dan Jumlah Penduduk Bekerja Perempuan terhadap PDRB per kapita di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat periode 2011-2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi peran perempuan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah. Oleh sebab itu penyusun mengambil judul penelitian **“Analisis Peran Penduduk Perempuan terhadap PDRB Per kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Periode Tahun 2011-2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Rata-rata lama Sekolah Perempuan, Jumlah Penduduk Bekerja Perempuan dan PDRB

Per kapita Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2011-2024?

2. Bagaimana hubungan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Rata-rata Lama Sekolah Perempuan, dan Jumlah Penduduk Bekerja Perempuan terhadap PDRB Per kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat baik secara simultan maupun parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, adapun tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Rata-rata Lama Sekolah Perempuan, Jumlah Penduduk Bekerja Perempuan, dan PDRB Per kapita Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2011-2024
2. Untuk menganalisis hubungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Rata-rata Lama Sekolah Perempuan, dan Jumlah Penduduk Bekerja Perempuan terhadap PDRB Per kapita Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat baik secara simultan maupun parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta memberikan kontribusi. Adapun manfaat penelitian terbagi atau manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan peran gender dan ketenagakerjaan terhadap kesejahteraan ekonomi daerah. Selain itu, adanya penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian empiris mengenai peran penduduk perempuan, yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG), rata-rata lama sekolah perempuan, dan jumlah penduduk bekerja perempuan terhadap PDRB per kapita di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat serta bagi penelitian lain yang ingin memperdalam terkait kajian tersebut. Tidak hanya itu, penelitian tersebut pula dapat menjadi bahan referensi serta acuan bagi Lembaga Pendidikan yang ada khususnya bagi Universitas Pasundan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam memahami peran penduduk perempuan terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan baru, umumnya di bidang ekonomi khususnya di Program Studi Ekonomi Universitas Pasundan

3. Bagi Mahasiswa/I

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi baru mengenai peran penduduk perempuan terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Barat serta peneliti yang tertarik ingin membahas kajian ini lebih lanjut.

4. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tantangan serta ilmu pengetahuan baru bagi penulis. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru bagi penulis sehingga dapat berguna bagi Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat pada saat ini ataupun di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam periode waktu 2011-2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap dan konsisten untuk seluruh variabel yang diteliti, serta mencakup dinamika ekonomi sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi sehingga dapat memberikan gambaran kondisi yang komprehensif. Dalam penelitian ini, PDRB per kapita dianalisis melalui indikator gender dan ketenagakerjaan. Indikator gender terdiri dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan rata-rata lama sekolah perempuan sebagai proksi kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, indikator ketenagakerjaan direpresentasikan melalui perempuan dalam kegiatan ekonomi. Variabel-variabel tersebut dipilih berdasarkan kajian teoritis dan empiris yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender, tingkat pendidikan, serta partisipasi kerja

yang berkualitas memiliki keterkaitan dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi daerah.